

BAB 1

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pada zaman sekarang ini, penetapan otonomi daerah dan penyerahan wewenang secara fiscal mengakibatkan di Indonesia akuntansi sector publik mengalami perkembangan yang semakin cepat. Dengan adanya desentralisasi fiscal diharapkan agar daerah mempunyai kemampuan dengan meningkatkan kelebihan yang dipunyai sebagai daya Tarik peminat para investor untuk terjun langsung ke daerah dan membuka usaha, yang meningkatkan pendapatan daerah dan memperbaiki ekonomi masyarakat.

Penilaian kinerja keuangan dapat dinilai dari laporan realisasi APBD, dikarenakan semakin tinggi belanja modal yang dikonsumsi maka berbanding lurus dengan tingkat produktifitas perekonomian yang tinggi dalam hal kinerja PEMDA.

Dwi Anggoro dkk, (2018) menyatakan bahwa Asas otonomi daerah yang telah diselenggarakan membuat pemerintah daerah mendapatkan hak dan kewajiban untuk mengurus sendiri rumah tangga nya di daerah dengan memerhatikan berbagai keperluan dalam menjalankan roda pemerintahannya. Kemandirian suatu daerah dapat diukur dengan kemampuan daerah tersebut dalam membiayai setiap kegiatan terlebih dalam hal keuangan oleh karena perkembangan pembangunan yang pesat bersumber dari penglokasian belanja modal yang tepat. Badjra & Nyoman (2017). Pendapatan asli daerah mengungkapkan jika kapasitas suatu daerah dalam menggali PAD apakah berdampak terhadap kemajuan daerah tersebut, jadi semakin tinggi bantuan PAD kepada APBD, maka semakin minimlah ketergantungan terhadap kontribusi terhadap pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian diatas,maka kami tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2021.**

Tabel 1. Tabel Fenomena

Laporan Keuangan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Kinerja keuangan, Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Kabupaten/ Kota	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (000)	Dana Perimbangan (000)	Belanja Modal (000)	Pertumbuhan Ekonomi (000)
Mandailing Natal	2017	80,581,689	1,045,563,864	268,234,398	3,56
	2018	84,809,924	1,064,375,457	199,849,015	1,83
	2019	98,758,815	1,139,343,820	206,392,843	1,94
	2020	90,454,777	987,393,737	138,152,201	3,17
	2021	142,409,606	1,127,055,151	217,236,641	3,20
Dairi	2017	128,489,751	790,001,520	260,705,969	4,93
	2018	73,906,825	785,653,448	201,561,438	5,01
	2019	74,360,339	826,507,838	197,567,865	4,82
	2020	86,204,500	1,014,860,892	195,879,275	-0,94
	2021	72,268,892	798,559,678	177,886,898	2,05
Toba Samosir	2017	54,840,824	753,482,195	199,230,031	4,90
	2018	52,298,961	705,931,666	152,970,217	4,96
	2019	68,042,531	735,587,572	135,339,350	4,85
	2020	49,852,010	659,358,633	46,115,734	-0,27
	2021	69,049,798	701,747,105	107,047,849	-0,27

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2021

I.2 LANDASAN TEORI

1.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang melanjutkan untuk mendukung pembangunan daerah dan bisnis untuk mengurangi jumlah uang yang diterima oleh pemerintah pusat. Dimana penerimaan daerah yang berasal milik negara (BUMN), atau (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun seperti, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Sedangkan pertumbuhan ekonomi yang diproksi dengan PDRB dapat merefleksikan kondisi perekonomian makro suatu daerah sehingga pendapatan masyarakat umum dan harga barang meningkat.

Besar pajak dan retribusi daerah yang dipicu sangat bergantung pada keadaan ekonomi masyarakat umum. Penting untuk dipahami bahwa pajak yang terlalu kuat dapat membahayakan mereka yang diharuskan memakainya, sehingga masyarakat umum tidak dirugikan. Namun perlu diketahui bahwa pajak yang tinggi dapat membebani para wajib pajak sehingga diharapkan bahwa pajak dan retribusi daerah tidak terlalu tinggi agar tidak membebani masyarakat. Tapi, di wilayah lain, pemerintah memiliki wewenang untuk menyediakan layanan publik seperti jalan, tempat parkir, dan pasar umum untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat umum.

1.2.2 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dana perimbangan atau dana transfer memiliki fungsi yang sangat penting dalam pencapaian efisiensi dan keseimbangan dalam memberikan layanan jasa public karena mempengaruhi kinerja keuangan karena dimana pendapatan yang diperoleh dari pusat selalu menggambarkan ketergantungan daerah dalam memenuhi kebutuhannya terhadap pemerintah pusat yang menurunnya kinerja keuangan (Bahrudin, 2017. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, demokratis, transparan dan efisien. Dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi. Dengan memaksimalkan potensi kondisi dan kebutuhan daerah, serta semangat pendanaan penyelenggaraan.

1.2.3 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat belanja modal (BM) yang tinggi memberikan gambaran dari infrastruktur dan sarana yang dibangun Halim (2014). Pada umumnya apabila tingkat pembangunan tinggi, hal tersebut akan meningkatkan pelayanan yang diterima oleh masyarakat yang nantinya akan berdampak baik terhadap kinerja keuangan. Hal tersebut membuktikan, semakin banyak belanja modal maka kemampuan dalam mengukur kinerja keuangan mengalami peningkatan. Antara lain,

otonomi daerah menciptakan kemandirian, pendelegasian wewenang, dan menggali potensi sumber-sumber daya Pemerintah Daerah sehingga dapat memetakan secara bisnis. Fenomena yang terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara menggambarkan tidak semua

Pemerintah Daerah mapan secara keuangan. Ini terlihat dari data pertumbuhan belanja daerah yang merupakan salah satu indikator dari kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan adanya perbedaan pertumbuhan belanja daerah yang tidak merata. Fenomena selanjutnya, yaitu terlihat bahwa adanya peningkatan pendapatan asli daerah tetapi tidak diikuti oleh peningkatan belanja daerahnya. Berdasarkan fenomena di atas terdapat masalah berupa kemampuan keuangan pemerintah daerah yang tidak merata dalam mendistribusikan belanja daerahnya. sebagian daerah menunjukkan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan sebagian lagi menunjukkan tingkat pertumbuhan yang sangat rendah. Perbedaan yang relevan dari pertumbuhan belanja daerah untuk Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara menunjukkan telah terjadi kesenjangan kemampuan keuangan antar daerah yang pada akhirnya akan menimbulkan kesenjangan kesejahteraan antar daerah. Kondisi dalam hal ini adalah membawa implikasi pada pelimpahan kewenangan antar pusat dan daerah di berbagai bidang.

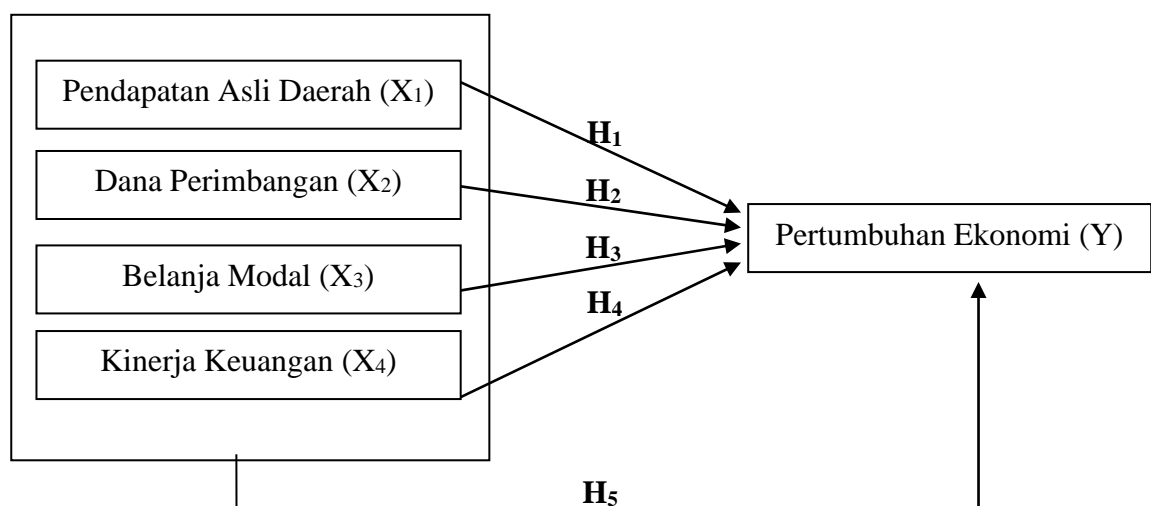
Berdasarkan masalah tersebut perlu adanya pembenahan. Hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk hidup sejahtera. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban setiap pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaannya dari sektor pendapatan asli daerah agar mampu membiayai pengeluaran daerahnya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

1.2.4 Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, oleh pribadi dan organisasi. Kinerja yang sedang dilakukan berjalan lancar jika pencapaian sesuai dengan apa yang diharapkan. Jika capaian tidak memenuhi apa yang diharapkan, adalah mungkin untuk mengatakan bahwa kinerjanya sangat baik. Jika capaian tidak sesuai harapan atau lebih tinggi dari yang diharapkan, maka kinerjanya jelek," bunyi pernyataan tersebut. Banyak kinerja ukuran, termasuk rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, dan rasio keserasian, hadir dalam organisasi

pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengelola kinerja keuangan. Untuk itu, penjelasan terkait hanya pada rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio efisiensi. Jadi pertumbuhan ekonomi kemampuan suatu negara dalam menyediakan kebutuhan akan barang dan jasa kepada masyarakat dalam jumlah yang banyak sehingga memungkinkan untuk kenaikan standar hidup yang mana berdampak pula bagi penurunan tingkat pengangguran dalam jangka panjang. Kemandirian dan pengelolaan secara ekonomis, efektif, dan efisiensi suatu daerah atau wilayah akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Hal ini dikarenakan kurang atau tidak adanya intervensi dalam hal kebijakan terkait dengan pengelolaan daerah tersebut. Di samping itu, aparatur daerah dapat secara inisiatif dan kreatif dalam mengelola daerah untuk mendorong pertumbuhan daerah.

1.3. Kerangka Konseptual



Gambar 1 Kerangka Konseptual